

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi tanpa oposisi tidaklah ideal jika berjalan di suatu negara. Koalisi-oposisi merupakan pembeda yang jelas antara otoritarianisme dan demokrasi. Setidaknya seperti itu keadaan yang menjadi pembeda antara negara yang menganut otoritarianisme dan Indonesia. Pernyataan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi kepada CNN Indonesia terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan “kami akan memosisikan diri sebagai oposisi konstruktif Gubernur Anies Baswedan”.¹

Di dalam sistem presidensial seperti di Indonesia ini, peran oposisi sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah bagian dari *check and balances* layaknya negara demokrasi. Sistem demokrasi memudahkan siapa saja untuk mencalonkan diri menjadi penguasa. Baik secara independen maupun melalui usungan sebuah partai, yang sejatinya mereka menjual kepentingan-kepentingan khalayak banyak sebagai bahan kampanye. Terkadang ada yang menepati janjinya, tapi ada pula yang lupa seakan tidak pernah memberikan janji-janjinya. Sehingga, rakyat perlu disadarkan bahwa mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasaan ialah kepentingan

¹ CnnIndonesia, PSI Jadi Oposisi Anies Penyeimbang PKS di DKI (diakses pada 15.09 2 Oktober 2022)

yang utama dari penguasa.² Dengan begitu, perubahan-perubahan dinamika politik yang bergerak dinamis, akan membuka peluang bagi partai oposisi yang bekerja di luar maupun di dalam koridor pemerintahan sebagai kelompok penekan yang berguna untuk mengontrol penguasa agar terkontrol baik dalam menjalankan kekuasaannya.³

Menurut Djayadi Hasan dalam Ade Prasetyo, oposisi erat kaitannya dengan sistem parlementer, sedangkan oposisi di Indonesia dianggap tidak biasa karena Indonesia menganut sistem presidensial. Sikap yang ditunjukkan oleh lite politik mempertegas bahwa oposisi bukan budaya politik Indonesia. Jadi, hampir menjadi suatu kepastian jika oposisi di Indonesia masih mencerminkan watak yang akomodatif dan pragmatis, sehingga presiden selalu dapat melakukan dukungan dan kompromi dengan DPR.⁴

Menjadi partai oposisi dalam pengaplikasian sistem politik di Indonesia memang hal yang sulit, bahkan tidak jarang disebut bahwa dalam sejarahnya oposisi tidak ada dalam kamus politik Indonesia.⁵ Dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku memang tidak secara tegas mengatur tentang koalisi dan oposisi. Walaupun begitu, sebagaimana peran dan fungsi legislatif, peran oposisi dapat dilakukan di ranah Lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan

² Ignas Kleden, *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 4.

³ Tuwoyo Admojo. 2015. Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. *Jurnal Politik*, 2015, 1(2), 4. hlm. 2

⁴ Ade Prasetyo. 2018. *Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS Terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla Pada Tahun 2014-2017* (Skripsi, Tidak Diterbitkan Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah). hlm. 3

⁵ Siti Zuhroh, "Dilema Oposisi Politik Partai Gerindra" artikel diakses pada 16 Februari 2023 dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Membedah-Peran-Fraksi-Gerindra-1457429725.pdf>

Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan yang sangat berpengaruh. Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan kewenangan DPR dapat langsung berhadapan dengan eksekutif. Dengan begitu akan memperkuat mekanisme pengawasan dalam mengawasi jalannya pemerintahan.⁶

Menurut Guillermo dalam Ade Prasetio selain kekuasaan yang disahkan oleh negara dalam sistem demokrasi, terdapat kekuatan politik lain yang berbeda bahkan dapat berseberangan pandangan dengan pemerintahan yang berjalan, yaitu kekuatan oposisi. Dalam kehidupan politik, kehadiran kekuatan oposisi telah menjadi dinamika dan tatanan demokrasi yang sangat penting. Hal tersebut merupakan kenyataan yang telah terjadi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, bahkan Malaysia dan umumnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.⁷ Biasanya hanya kelompok yang memiliki kesadaran politik dan motivasi yang sangat besar saja yang siap dan mampu menerima resiko untuk bergerak di luar arena⁸.

Oposisi juga berguna dalam menjaga persaingan yang sehat di antara para elite politik untuk bersatu-padu membangun negara. Pemerintahan yang

⁶ Lili Romli, "Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945," *Politica*, V, no. 3-2 (November 2012): hlm. 195.

⁷ Koran Sindo. 2014. Oposisi Anak Sah Sistem Demokrasi. <https://nasional.sindonews.com/read/-887439/18/oposisi-anak-sah-sistemdokrasi1406875364/13> (diakses pada 11 November 2022 puku 15.52)

⁸ Ade Prasetio. 2018. *Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS Terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla Pada Tahun 2014-2017* (Skripsi, Tidak Diterbitkan Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah). hlm. 2.

berkuasa akan terjaga dan tentu menyadari ada pihak lain yang mengontrol dan bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik.⁹ Dengan begitu oposisi berkenaan pada sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyatakan kebebasan pendapat dan melakukan kegiatan-kegiatan, guna memberikan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pada pemerintahan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Artinya, menjadi oposisi bukan hanya ingin berbeda dalam memandang pemerintah yang tidak kompeten, pesimistis, dan lemah¹⁰ melainkan suatu kondisi normal dalam sistem demokrasi. Hanya saja, oposisi yang dilakukan di suatu negara lazimnya berbeda-beda karena sangat bergantung pada sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang berlaku di negara tersebut.

Ketika PSI menyatakan menjadi oposisi pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan yang diusung oleh PKS, PSI telah mempersiapkan Direktorat Penelitian Kebijakan dan Perundang-undangan untuk meneliti kebijakan atau rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tujuannya, menghasilkan kajian ilmiah tentang kebijakan rancangan undang-undang/peraturan daerah untuk mendukung ataupun tidak mendukung kebijakan yang akan diambil pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dikepalai oleh Anies Baswedan. PSI adalah partai nasional yang berprinsip menentang kebijakan/peraturan yang diskriminatif tanpa atau label agama sekalipun. Karena secara ideologi, PSI sangat kontra dengan narasi dari ideologi

⁹ Noor, op.cit hlm. 5.

¹⁰ Damanhuri, 2009, *Konsep Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, hlm. 12.

PKS. PSI terhadap pemerintahan Anies Baswedan dikenal sebagai kelompok oposisi.¹¹

Kajian mengenai oposisi terhadap pemerintahan tertentu sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh penelitian yang ditulis Ade Prasetyo, membahas Oposisi Gerindra Dan PKS Terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penelitian ini memusatkan analisis oposisi partai politik di Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun 2014-2017.¹²

Kedua, penelitian yang ditulis Zuliastuti Arumsari, penelitian ini membahas mengenai dinamika oposisi politik dalam parlemen pada tahun 2013-2017". Pada penelitian ini berfokus pada perebutan kekuasaan di Venezuela antara pemerintah sah yang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Maduro menghadapi kelompok oposisi yang semakin kuat pada tahun 2013-2017.¹³

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Kurniawan, banyak partai yang didirikan di Indonesia merupakan akibat dari sistem presidensial multipartai yang dianut, partai-partai mempunyai kecenderungan untuk melakukan koalisi. Kenyataan tersebut menjadikan partai-partai melakukan kompromi untuk menentukan arah pilihan politiknya. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sikap dan bentuk oposisi

¹¹ Firman Noor, *Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia*", Masyarakat Indonesia, Vol 42, No. 1, Juni 2016, h.5.

¹² Prasetyo, A. (2018). *Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS Terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla Pada Tahun 2014-2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

¹³ Arumsari, Z. (2019). *Dinamika Politik Venezuela: Pengaruh Oposisi Dalam Parlemen Tahun 2013-2017*.

partai Gerindra terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019.¹⁴

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Munadi. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasanya Demokrasi memberikan rakyat opsi-opsi dan hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Akibatnya, oposisi dan koalisi eksis dalam sistem politik ini. Penelitian ini berfokus pada elite politik cenderung menghasilkan demokrasi semu dan setengah hati. Oleh karena itu, potret demokratisasi diperlukan sebagai penguat dari semua elemen masyarakat sipil dan dengan demikian tidak dilihat sebagai "gerakan taat pada negara", tetapi gerakan mendesak untuk mengubah sikap negara.¹⁵

Penelitian mengenai dinamika oposisi sudah sering diteliti dengan permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Berbeda dari keempat penelitian di atas tentang dinamika oposisi, fokus pada penelitian ini adalah model oposisi sebagaimana kritik Partai Solidaritas Indonesia atas kebijakan pemerintahan Anies Baswedan pada periode 2017-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Anies Baswedan-Sandiaga Uno secara resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 16 Oktober 2017. Keduanya resmi menjadi

¹⁴ Kurniawan, K. (2019). *Sikap Oposisi Partai Gerindra Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

¹⁵ Munadi, M. (2019). Oposisi dan Koalisi. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 1-20.

DKI 1 dan DKI 2 setelah berkompetisi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dalam 2 putaran. Putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapatkan suara sebanyak 937.950 dengan 17,02%, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat memperoleh suara sebanyak 2.364.577 dengan 42,99%, sedangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat perolehan suara sebanyak 2.197.330 suara dengan 39,95%. Sesuai dengan UU Pilgub DKI jika tidak ada satu pasangan yang meraih 50% suara maka harus berlangsung dua putaran.

Putaran kedua diikuti oleh pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 3.240.987 suara dengan 57,96% dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan perolehan 2.350.366 suara dengan 42,04%. Dengan perolehan suara total lebih dari tiga juta warga DKI Jakarta yang berusia 17 tahun atau lebih menjadikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Belum genap setahun menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno resmi mundur dari jabatannya setelah membacakan surat pengunduran diri di Gedung DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna pada Senin, 27 Agustus 2018 demi maju untuk berkontestasi di pemilihan presiden pada 2019 silam. Anies Baswedan secara resmi memimpin Ibukota seorang diri dari 18 September 2018 hingga 15 April 2020 ketika Ahmad Riza Patria ditunjuk untuk mengisi kursi kosong yang telah lama ditinggal Sandiaga Uno.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh PSI sejak didirikan pada tahun 2014. Pemilu 2019 merupakan pemilu simultan pertama yang diadakan untuk memilih presiden dan legislatif yang duduk di tingkat nasional maupun daerah. *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen mengakibatkan PSI tidak lolos legislatif nasional di Senayan. *Parliamentary Threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.¹⁶

Pada pemilu 2019 ambang batas parlemen agar sebuah partai bisa mendapat kursi di Senayan dengan memperoleh suara minimal 4% dari jumlah total suara. Ketentuan ini ditetapkan dalam UU nomor 7 Tahun 2017 berlaku untuk pemilu 2019 dan 2024.¹⁷ Dalam pemilu 2019, PSI hanya memperoleh sekitar 2.650.361 suara atau sekitar 1,89% dari total suara di tingkat nasional. Sesuai ketentuan yang berlaku, Partai yang menarget partisipan di kalangan anak muda ini tidak mendapat jatah di DPR.¹⁸ Meski begitu, pada tingkat lokal

¹⁶ Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta. Gramedia. hlm. 282

¹⁷ Kompas.com, 2018, Perludem: Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Persaingan Parpol Semakin Sengit. <http://perludem.org/2018/05/13/perludem-ambang-batas-parlemen-4-persen-persaingan-parpol-semakin-sengit/> (diakses 2 Oktober 2022 pukul 17.31)

¹⁸ Yanurisa Ananta, 2019, Resmi! Pdp Juara Pileg 2019 Dan Kegagalan Ps Hingga Hanura. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190522075924-4-74140/resmi-pdp-juara-pileg-2019-dan-kegagalan-psi-hingga-hanura> (diakses 2 Oktober 2022 pukul 17.55)

di Provinsi DKI Jakarta, PSI memperoleh 404.508 suara. Perolehan suara tersebut membuat PSI mendapatkan 8 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, PSI merupakan satu-satunya partai yang bukan petahana yang masuk ke DPRD DKI.¹⁹ Berikut merupakan perolehan kursi yang didapatkan masing-masing partai di DPRD DKI Jakarta.

Tabel 1. 1
Partai yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta

No.	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	PDI-Perjuangan	1.336.344	25
2.	Partai Gerindra	935.793	19
3.	PKS	917.005	16
4.	PSI	404.508	8
5.	Demokrat	386.434	10
6.	PAN	375.882	9
7.	Partai Nasdem	309.790	7
8.	PKB	308.212	5
9.	Partai Golkar	300.246	6
10.	PPP	175.935	1

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai baru yang menunjukkan eksistensinya sebagai partai nasionalis yang menargetkan anak muda dengan cara menjadi oposisi di wilayah Ibukota negara yaitu Provinsi DKI Jakarta. Mendapat perolehan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta, PSI seringkali memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

¹⁹ Kompas.com, 2019, Debut Perdana, Psi Raih 8 Kursi Di Dprd DKI, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/12/19034321/debut-perdana-psi-raih-8-kursi-di-dprd-dki> (diakses 2 Oktober pukul 19.30)

Peneliti berasumsi bahwa kritik yang dilakukan PSI sebagai oposisi di pemerintahan Anies Baswedan untuk melaksanakan *check and balances*. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Anies Baswedan mendapat respon yang keras dari PSI serta terdapat perdebatan pro dan kontra di tengah masyarakat. *Pertama*, kritik yang paling menyita perhatian adalah saat PSI meminta Formula E dibatalkan. Meminta Formula E dibatalkan bukan tanpa sebab, PSI menuturkan balapan mobil listrik itu tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah Pemerintah Provinsi DKI. Bahkan, fraksi PSI akan melobi anggota DPRD DKI dari fraksi lain untuk sama-sama menolak anggaran tersebut dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020 oleh Badan Anggaran DPRD DKI.²⁰

Kedua, anggaran pembelian lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp82 miliar dan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar. Wiliam yang merupakan fraksi PSI di DPRD DKI mengatakan

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak”, kepada *kompas.com* Rabu (30/10/2019).

Wiliam juga mempertanyakan, tidak transparannya pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.²¹

²⁰ Kompas.com, 2019, Usai Ungkap Anggaran Janggal, Kali Ini PSI DKI Minta Formula E Dibatalkan. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/08/07575251/usai-ungkap-anggaran-janggal-kali-ini-psi-dki-minta-formula-e-dibatalkan?page=all> (diakses 3 Oktober 2022)

²¹ Kompas.com, 2019, Selain Lem Aibon, PSITemukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, Dan Server Rp 66 M. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/30/14480591/selain-lem-aibon-psi-temukan-anggaran-bolpoin-rp-124-m-komputer-rp-121-m?page=all> (diakses 3 Oktober 2022 pukul 10.36)

Ketiga, penanggulangan prostitusi dengan menutup tempat hiburan Alexis. Melalui Juru Bicara, Dedek Prayudi, PSI menyatakan partainya sepaham dengan Anies untuk menanggulangi prostitusi. Namun, ia berpendapat, cara Anies dalam melihat prostitusi sangatlah tidak tepat. Sebab PSI menilai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan korban dari ketidakadilan sosial dan buruknya ekonomi. Dedek mengatakan:

“Kami ingin membantu gubernur untuk menanggulangi prostitusi dengan pemberdayaan. Ini pelanggaran sosial, bukan hukum. PSI dalam tanda kutip lagi kan partai perempuan, perempuan ini seharusnya diberdayakan dengan program-program yang membukakan jalan untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan bukan hanya laik tapi jauh dari potensi diskriminatif.”

Dengan demikian, sebagaimana fungsi partai politik, partai oposisi juga berfungsi untuk mengkritik pemerintah dan mengontrolnya secara konstruktif. Tanpa oposisi dan kritik, pemerintah akan cenderung puas dan kesulitan mencari alternatif kebijakan yang telah dihasilkan. Walaupun begitu, ketajaman kritik PSI setelah Anies Baswedan lengser mulai mengendur. Patut dipertanyakan apakah gerakan oposisi yang dilakukan oleh PSI terhadap pemerintahan Anies Baswedan adalah murni karena kebijakan yang ditetapkannya tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat atau hanya tendensius terhadap pribadi Anies Baswedan, yang mana dua hal tersebut merupakan pembeda dari dua model oposisi menurut Skilling. maka berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian mengenai: “Model Oposisi Partai Solidaritas terhadap Pemerintahan Anies Baswedan pada Periode 2017-2022”.

Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan, maka rumusan dari penelitian ini yaitu, bagaimana model oposisi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Pemerintahan Anies Baswedan pada periode 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis model oposisi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Pemerintahan Anies Baswedan pada Periode 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat di antaranya:

1.4.1 Akademik

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam model oposisi partai politik di Indonesia.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan para pemangku kebijakan atau pemegang kekuasaan untuk mempelajari dan menghadapi partai-partai politik yang mengumumkan diri sebagai oposisi di wilayah lokal ataupun nasional yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia di DKI Jakarta.

